

BAB I

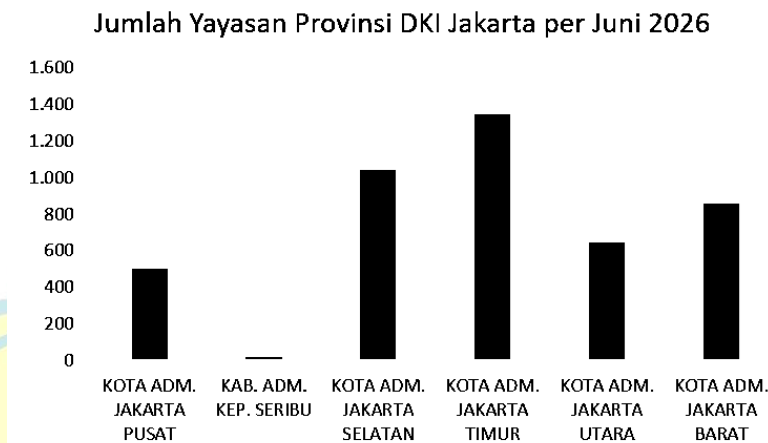
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Entitas berorientasi nonlaba merupakan organisasi yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak berorientasi pada pencarian laba, melainkan berfokus pada pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, maupun kemanusiaan. Entitas ini memperoleh sumber daya dari masyarakat atau pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap tujuan organisasi, sehingga pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting karena entitas berorientasi nonlaba memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang memberikan kontribusi terhadap organisasi (Fitri et al., 2023).

Salah satu bentuk entitas berorientasi nonlaba adalah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Arthawan et al., 2025). Dalam menjalankan kegiatannya, yayasan mengelola berbagai sumber daya yang berasal dari sumbangan, hibah, bantuan pemerintah, dan donasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya tersebut memerlukan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang baik agar penggunaan dana dapat

dipertanggungjawabkan kepada para donatur, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya (Putri & Wibowo, 2024).



Gambar 1.1. Jumlah Yayasan Provinsi DKI Jakarta per Juni 2026

Sumber: data.kemendikdasmen.go.id (2026)

Perkembangan yayasan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah yayasan di Provinsi DKI Jakarta mencapai 4.416 yayasan per Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah yayasan terbanyak, yaitu sebanyak 1.344 yayasan, lebih tinggi dibandingkan wilayah administrasi lainnya di DKI Jakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki aktivitas penyelenggaraan organisasi berorientasi nonlaba yang cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi semakin penting. Semakin banyaknya yayasan yang beroperasi juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan yang baik serta penyusunan laporan keuangan yang

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan tingginya jumlah yayasan tersebut, kebutuhan akan pedoman akuntansi yang terstandarisasi menjadi semakin mendesak, khususnya bagi yayasan yang memiliki aktivitas operasional kompleks seperti Yayasan X. Hal ini disebabkan karena setiap yayasan dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya informatif, tetapi juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. Dalam konteks tersebut, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 (ISAK 335) menjadi sangat relevan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan pedoman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang dapat menjadi acuan bagi yayasan dalam menghasilkan laporan yang sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf sekretariat Yayasan X, yaitu Bapak Syahrul Jamil, Yayasan X memperoleh sumber penerimaan dari berbagai kegiatan, antara lain infak, sedekah, hibah, kotak amal, penyewaan aula, dana kegiatan keagamaan, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), serta uang pangkal peserta didik yang dialokasikan sebagai wakaf. Dana yang dikelola yayasan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional yayasan, antara lain pembayaran gaji dan uang penghargaan bagi karyawan sekretariat, marbot masjid, guru, serta karyawan unit pendidikan kelompok

bermain Islam, taman kanak-kanak Islam, dan sekolah dasar Islam. Selain itu, dana juga digunakan untuk membiayai operasional masjid, operasional sekolah, dan operasional sekretariat yayasan. Beragamnya sumber penerimaan dan pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa yayasan mengelola dana dengan karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur agar seluruh transaksi dapat dicatat, dikelompokkan, dan dilaporkan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur, jamaah, peserta didik, orang tua peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana sekaligus sarana untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan yayasan secara transparan. Berdasarkan dokumen laporan keuangan tahun 2022 yang diperoleh peneliti dari pihak yayasan, diketahui bahwa Yayasan X telah menyusun laporan keuangan dan bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik dalam proses penyusunannya. Laporan keuangan tersebut juga telah diaudit dan memperoleh laporan auditor independen. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen yayasan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, proses penyusunan laporan keuangan masih sangat bergantung pada pihak eksternal karena yayasan belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pencatatan transaksi, pengelompokan akun, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian administrasi keuangan secara mandiri.

Berdasarkan hasil observasi terhadap laporan keuangan tahun 2022 yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa yayasan masih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai dasar pengakuan dan pengukuran transaksi serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk laporan keuangan yang masih menggunakan klasifikasi dan konsep yang mengacu pada PSAK 45. Sedangkan, PSAK 45 telah digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 (ISAK 335) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Selanjutnya, ISAK 335 mengalami perubahan penomoran menjadi ISAK 335 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.

Di sisi lain, SAK ETAP juga telah digantikan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang menjadi pedoman bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, termasuk yayasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pada Yayasan X masih memerlukan penyesuaian terhadap standar akuntansi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pedoman akuntansi yang mengintegrasikan ketentuan dalam SAK EP dan ISAK 335 agar proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai standar.

Permasalahan lain yang dihadapi Yayasan X adalah belum terstandarisasinya mekanisme pengumpulan dan pelaporan data keuangan dari

unit-unit yang berada di bawah pengelolaannya. Data penerimaan dan pengeluaran dari unit masjid maupun unit pendidikan sering kali tidak disampaikan secara tepat waktu kepada bagian keuangan yayasan. Berdasarkan hasil wawancara, data transaksi suatu bulan terkadang baru diterima pada bulan berikutnya sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses konsolidasi data keuangan memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

Selain aspek kesesuaian terhadap standar akuntansi, yayasan juga belum memiliki pedoman tertulis yang mengatur siklus pengelolaan keuangan secara menyeluruh, mulai dari proses penerimaan kas, pengeluaran kas, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, pelaporan antarunit, hingga penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan keuangan masih sangat bergantung pada kebiasaan kerja yang berjalan dan bantuan pihak eksternal. Akibatnya, efektivitas pengelolaan keuangan dan keberlanjutan proses pelaporan keuangan berpotensi mengalami kendala apabila terjadi pergantian staf atau perubahan personel yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi ISAK 335 dan SAK EP pada entitas berorientasi nonlaba masih menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian. Berdasarkan penelitian Syamsulhadi et al. (2025), masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba,

di mana sebagian entitas masih menggunakan standar lama seperti PSAK 45. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya penerapan ISAK 335 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yayasan, serta perlunya perbaikan sistem dan format pelaporan yang sesuai standar terbaru. Sejalan dengan itu, Fahmi dan Tezar (2025) menunjukkan bahwa sistem berbasis Google Spreadsheet dapat membantu penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 335, namun masih terbatas pada skala kecil dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan entitas yang lebih kompleks. Selain itu, Putri et al. (2024) melalui pendekatan R&D model ADDIE menemukan bahwa aplikasi Akoontan.com dapat meningkatkan kemudahan penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 335, meskipun masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara luas.

Selanjutnya, penelitian Nisa et al. (2025) menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335 dapat meningkatkan pemahaman pengelola lembaga serta memperkuat kepercayaan publik, meskipun masih bergantung pada pendampingan eksternal. Penelitian Chantika et al. (2025) serta Arthawan et al. (2025) juga menemukan bahwa penerapan SAK EP dan ISAK 335 melalui pendekatan sistem atau pedoman seperti Google Spreadsheet dan modul akuntansi dapat meningkatkan efektivitas pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas entitas berorientasi nonlaba. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada pengembangan awal dan belum sepenuhnya menjadi sistem yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Patricia et al. (2024), Sidratil Muntaha et al. (2024), dan Hamid et al. (2026) menunjukkan bahwa entitas berorientasi nonlaba seperti yayasan dan masjid masih belum sepenuhnya menerapkan ISAK 335, dengan praktik pencatatan yang masih sederhana. Hasil rekonstruksi laporan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan secara signifikan. Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi ISAK 335 dan SAK EP masih belum optimal, sehingga diperlukan pengembangan pedoman akuntansi yang lebih sistematis dan aplikatif untuk membantu yayasan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat menjadi acuan bagi pengurus yayasan dalam melaksanakan proses pencatatan, pengelompokan akun, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan keuangan secara sistematis dan berkelanjutan. Pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, proyek ini dilaksanakan dengan judul **“Perancangan Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Yayasan X Berdasarkan SAK EP dan ISAK 335.”**

B. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi agar proses akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan yayasan dapat berjalan secara sistematis serta sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan akan penyesuaian praktik penyusunan akuntansi dan laporan keuangan yang saat ini diterapkan oleh Yayasan X dengan ketentuan dalam SAK EP dan ISAK 335, khususnya terkait klasifikasi bagan akun, pengakuan dan pengukuran transaksi, penerapan siklus akuntansi, serta penyajian laporan keuangan.
2. Analisis kebutuhan akan penyusunan pedoman akuntansi dan laporan keuangan yang tidak hanya memuat format laporan keuangan, tetapi juga menjelaskan langkah-langkah teknis secara rinci mulai dari pengelompokan dan klasifikasi bagan akun. proses pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EP dan ISAK 335.

C. Tujuan Proyek

Proyek perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan SAK EP dan ISAK 335 pada Yayasan X. Secara lebih rinci, tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik penyusunan akuntansi dan laporan keuangan yang diterapkan oleh Yayasan X dengan ketentuan dalam SAK EP dan ISAK 335.
2. Untuk merancang pedoman akuntansi dan laporan keuangan yang sistematis dan aplikatif sebagai acuan bagi Yayasan X dalam melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EP dan ISAK 335.